

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini hampir setiap negara menghadapi persaingan global, dimana persaingan global ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan. Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial yang harus dibasmi untuk menyehatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat, karena kemiskinan dapat menjadi virus kriminalitas bagi masyarakat (Junaedi, dkk. 2021). Kemiskinan tidak hanya menjadi salah satu masalah terbesar di negara Indonesia saja, namun hampir setiap negara-negara berkembang sedang berjuang untuk meminimalkan jumlah kemiskinan di negaranya, selain itu kemiskinan ini juga dapat mempengaruhi keadaan pembangunan perekonomian suatu negara.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang masih dalam proses pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Berbagai upaya telah diterapkan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa negara Indonesia yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia yang berbunyi membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini, Kualitas kehidupan masyarakat Indonesia berada pada tingkat dimana kesejahteraan yang tergolong cukup rendah dilihat dari tingkat kesehatan, tingkat

pendidikan yang masih belum memadai, dan kesejahteraan sosial masyarakat yang dapat diukur dengan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan di Indonesia terus menerus menjadi pusat perhatian Pemerintah. Rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas hidup menyebabkan rendahnya produktivitas penduduk sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Tingginya angka kemiskinan juga menggambarkan ketidakefektifan upaya otoritas publik dalam mengurangi kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat miskin.

Saat ini juga pemerintah sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan dimana Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah besarnya pengeluaran belanja pemerintah untuk pendidikan (termasuk gaji) yang dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan. (Amandemen UUD 1945). UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 Pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial meliputi: 1. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk perlindungan kesehatan melalui jaminan sosial (PBI) yang berasal dari APBN. 2. Jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (KIP, KPS, PKH, Rastra/Raskin) yang berasal dari APBN. Artinya, bahwa sebesar 40,8 persen dari APBN dialokasikan untuk pengeluaran layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial).

Jika kita lihat dalam arti sempit kemiskinan ini dipahami sebagai keadaan atau kekurangan uang dan barang untuk menjamin keberlangsungan hidup. Selanjutnya dalam arti luas Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu

fenomena *multiface* atau *multidimensional* (Junaedi,dkk 2021) Kondisimasyarakat yang hidup dalam belunggu kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan juga ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak (Ali khomsan, dkk 2017).

Selanjutnya menurut (Nurwati, 2008) mengemukakan bahwa terdapat 5 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu antara lain Pendidikan; Jenis pekerjaan; Gender; Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar; Infrastruktur dan lokasi geografis. Dimana semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah pula tingkat pengetahuan dan kemampuannya, akibatnya sebagian besar dari orang yang berpendidikan rendah akan memperoleh pendapatan yang rendah pula, dan banyak diantaranya bekerja sebagai petani tahunan, kuli bangunan, begitu juga sebaliknya apabila semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan memungkinkan semakin tinggi pula kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki yang akan membuat tingkat penghasilan seseorang tersebut dan jenis pekerjaannya akan semakin baik (Joseph, 2018:37).

Pendekatan ekonomi melihat kemiskinan itu sebagai hasil dari kesenjangan dalam kepemilikan dalam faktor produksi, kegagalan dalam kepemilikan, kebijakan yang tidak adil, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia atau SDM, serta rendahnya akumulasi modal atau kurangnya insentif

untuk investasi. Di sisi lain, pendekatan sosio-antropologi yakni lebih menekankan pengaruh budaya dalam mempertahankan kemiskinan, seperti budaya yang menerima keadaan atau kondisi apa adanya (Maipita, 2014:9).

Selanjutnya ada beberapa faktor ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan menurut (Kuncoro, 2003) yaitu Pertama, secara mikro, kemiskinan terjadi karena ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin memiliki sumberdaya yang terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul karena perbedaan dalam segi kualitas sumberdaya manusia. Jika Sumber daya manusia memiliki kualitas yang rendah maka produktivitasnya akan rendah pula dan upah yang diterima rendah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dapat disebabkan oleh pendidikan yang kurang, ketidakberuntungan, diskriminasi, ataupun dapat disebabkan dari faktor keturunan. Ketiga, kemiskinan juga terjadi karena perbedaan akses terhadap modal. Ketiga faktor penyebab kemiskinan ini saling terkait dan membentuk lingkaran dalam kemiskinan, seperti yang dijelaskan oleh (Nurkse, 2003:132) Ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan produktivitas yang rendah.

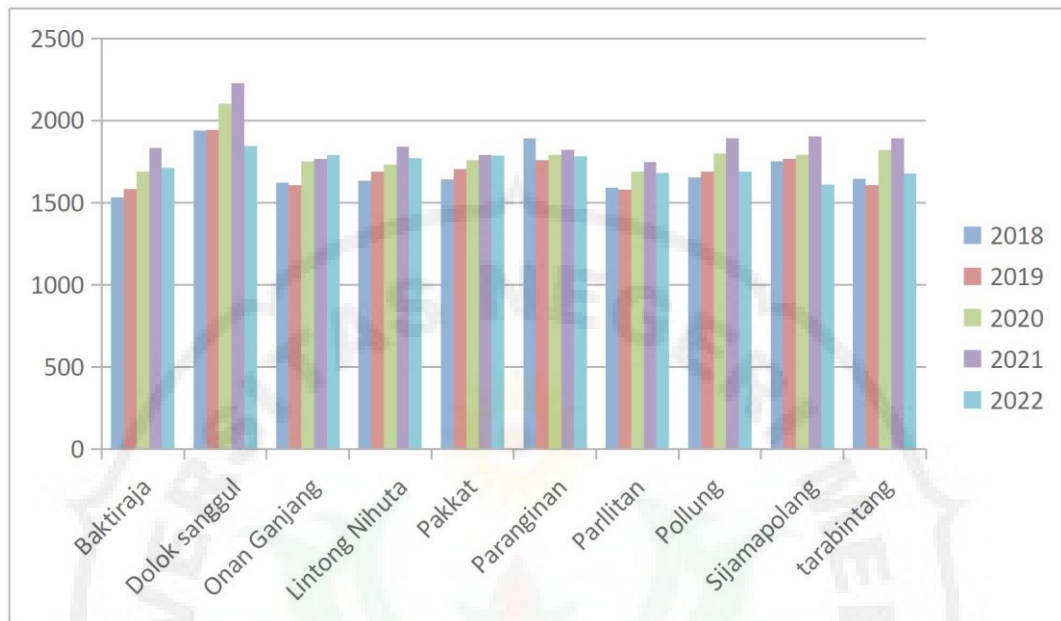
Todaro dan Smith menyatakan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan kemampuan manusia untuk mengakses fasilitas pendidikan akan terhambat sehingga kondisi penduduk menjadi terbelakang dan buta huruf.

Menurunkan angka kemiskinan telah menjadi tujuan utama dari kebijakan publik hampir setiap negara termasuk Indonesia. Menurut Kuncoro (2009) menyebutkan bahwa :

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimumnya. Kemiskinan ini ditandai dengan rendahnya tingkat kepemilikan akan sumber daya, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, serta rendahnya akses infrastruktur dan akses dalam modal.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275,77 juta jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut terdapat 26,36 juta jiwa diantaranya merupakan penduduk miskin. Dalam hal ini menurut World Bank (2022) Indonesia menjadi negara dengan urutan ke 73 negara termiskin di dunia. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang terdiri dari 33 Kabupaten/Kota, sejauh ini yang juga berupaya untuk meminimalkan jumlah Kemiskinan. Dimana jumlah kemiskinan di provinsi ini cukup besar yaitu 739.86 ribu jiwa dan jumlah ini menduduki peringkat ke-11 provinsi termiskin di Indonesia. Hal ini membuat jumlah kemiskinan di Sumatera Utara menjadi fokus perhatian Pemerintah guna memperbaiki tatanan Masyarakat yang Sejahtera sesuai dengan harapan pemerintah dan yang telah dicantumkan di UUD 1945.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/kota, dimana dari 33 Kabupaten/Kota ini salah satu Kabupaten yang memiliki kemiskinan yang cukup tinggi adalah Kabupaten Humbang Hasundutan. Humbang Hasundutan adalah salah satu kabupaten dengan jumlah kemiskinan sebesar 9,65 % dimana jumlah ini cenderung berfluktuatif setiap tahunnya, hal ini dapat kita lihat dari table dibawah ini.



Sumber : (Badan Pusat Statistik Humbang Hasundutan 2022)

Gambar 1.1

Jumlah Penduduk miskin per Kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan 2018-2021.

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa kemiskinan di Humbang Hasundutan cenderung berfluktuatif setiap tahunnya tanpa adanya penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan. Dimana Kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Dolok Sanggul pada tahun 2021 yaitu sebesar 2227 dan terendah ada di kecamatan Baktiraja yaitu sebesar 1533. Upaya dalam menanggulangi masalah Kemiskinan sejauh ini pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan, berbagai upaya, dan program- program untuk menanggulangi kemiskinan, walau kita tahu kemiskinan tidak akan dapat dihapuskan namun dapat di minimalisasikan (Ali khomsan, dkk 2017:3). Menurut (Murdiyana & Mulyana, 2017) menyatakan bahwa kemiskinan ini harus dan dapat diminimalisasikan. Mengatasi masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang sangat rumit dan

juga sulit untuk diatasi ataupun dipecahkan. Sehingga pemerintah telah mengembangkan serta menerapkan beberapa program perlindungan sosial yaitu dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang saat ini berupa bantuan uang tunai dan bantuan pangan yang dapat menjadi solusi mengurangi dan menekan angka kemiskinan (Todaro 1995:202). Selanjutnya (Maipita, 2014:177) menyatakan bahwa Kebijakan yang dilakukan pemerintah yang mampu dan berpengaruh mengurangi kemiskinan secara teori yakni pemberian Bantuan kepada Masyarakat dan juga program perlindungan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Sampai saat ini bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah semakin beragam, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah upaya yang dilakukan dalam mengurangi kemiskinan yang cukup efektif juga.

Selanjutnya menurut Rondinelli (1990:91) terdapat tiga strategi dasar program pembangunan yang bertujuan untuk membantu penduduk miskin melalui pembangunan desa terpadu atau suatu proyek yang difokuskan pada produksi dan pelayanan untuk penduduk desa, strategi kedua yaitu memusatkan bantuan pangan untuk mengatasi kekurangan dalam standar hidup penduduk miskin melalui program pemenuhan kebutuhan dasar manusia, sedangkan strategi yang ketiga yaitu memusatkan bantuan yang diberikan pada kelompok masyarakat yang memiliki sosial ekonomi yang sama, dan pada masyarakat yang terjebak dalam

lingkaran kemiskinan, melalui program atau proyek yang dirancang pemerintah khusus untuk masyarakat miskin (Kadji, 2004).

Salah satu tantangan dalam pengurangan kemiskinan adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait. Dimana program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sering kali dilaksanakan secara terpisah oleh satu atau beberapa lembaga, tanpa adanya koordinasi yang efektif. Akibatnya, seringkali program-program yang diluncurkan tidak tepat sasaran, kurang terarah, dan sulit terkontrol. Bahkan, terkadang terjadi tumpang tindih antar program atau program tidak efektif secara menyeluruh (Maipita, 2014:187). Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu bantuan yang sampai saat ini disalurkan Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) telah dikenal terlebih dahulu dalam dunia Internasional dengan kata *Conditional Cash Transfer (CCT)* dan juga program ini dikenal cukup berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program ini juga merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang sudah diluncurkan dan dikenalkan pemerintah mulai tahun 2007 lalu, program ini memberikan bantuan kepada penerima bantuan yang berkekurangan ataupun tidak dapat melanjutkan pendidikannya agar terbantu untuk tetap melanjutkan pendidikan anak penerima bantuan ini. Penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang juga sedang mengalami sakit ataupun kekurangan akses dalam mendapatkan layanan kesehatan, baik seperti BPJS keluarga yang sedang mengalami sakit maupun seorang ibu yang sedang hamil atau mengandung akan

dipermudah dalam mengakses layanan kesehatan ini, baik itu juga dari pemberian pemberian posyandu, maupun vitamin kepada keluarga penerima bantuan ini. Lansia dan penyandang disabilitas juga menerima perawatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

PKH ini ditujukan sebagai salah satu upaya dalam Penanggulangan masalah Kemiskinan dengan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia dan perubahan perilaku masyarakat miskin yang menerima bantuan yang telah disalurkan (Maipita, 2014:188). Selain itu PKH (Program Keluarga Harapan) berperan dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan milenium, dimana terdapat lima komponen tujuan yang didukung oleh bantuan PKH ini yakni : Pengurangan jumlah penduduk miskin dan juga kelaparan, akses yang baik terhadap pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi maupun balita, serta penekanan angka kematian ibu saat melahirkan. Secara umum Program PKH ini memberikan bantuan secara finansial kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) dengan beberapa syarat yang sudah diterapkan pemerintah untuk diterapkan para penerima bantuan yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini didasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang menjabat sebagai Ketua dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yaitu Keputusan no. 32/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 mengenai Tim pengendalian dalam Program Keluarga Harapan dan juga Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan PKH, yaitu tercantum dalam keputusan no.02/HUK/2008 tentang Tim Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan sosial yang disalurkan selanjutnya yaitu BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai ini salah satu bantuan diberikan secara non tunai yang disalurkan Pemerintah yaitu berupa sembako yang disalurkan kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan dan bantuan ini diberikan setiap bulannya melalui rekening elektronik yang ditunjukkan dari masing masing desa yang telah ditentukan (Maharani, 2017). Bantuan Pangan Non Tunai ini diharapanditujukan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi jumlah ataupun tingkat kemiskinan (Maharani, 2017).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 mengatur sistem baru terkait penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan pangan non tunai ini merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang dimana mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dianggap ebih efisien, tepat sasaran, tepat waktu, berkualitas, dan administratif. Kartu elektronik yang digunakan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, atau toko dengan harga yang berlaku. Hal ini membantu masyarakat mendapat nutrisi yang lebih baik dan seimbang, tidak hanya karbohidrat tetapi juga protein seperti telur yang selanjutnya kan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Tujuan utama dari kedua program bantuan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesejahteraan masyarakat dan mengurangi siklus kemiskinan yang berlangsung dalam beberapa generasi.

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu Kabupaten penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2014 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diluncurkan mulai sejak tahun 2018 dalam upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan Kemiskinan pada Kabupaten ini. Humbang Hasundutan ini terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu Baktiraja, Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Lintongnihuta, Pakkat, Paranginan, Parlilitan, Pollung, sijamapolang, dan Tarabintang. Meskipun bantuan PKH dan BPNT yang diberikan sudah cukup lama dan cukup banyak namun dalam penerapannya bantuan PKH dan BPNT yang disalurkan ini masih tergolong belum mampu dalam menekan jumlah kemiskinan khususnya di kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat kita lihat dari data table 1.2 dimana kemiskinan dari tahun ke tahun tidak signifikan menunjukkan penurunan angka kemiskinan melainkan berfluktuatif setiap tahunnya.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Lilik Rodhiatun Nadhifa dkk, 2021), terdapat hubungan yang negatif dan berdampak signifikan antara Program Keluarga Harapan terhadap Kemiskinan dimana program ini mampu mengurangi Kemiskinan di kabupaten Pati.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh (Helvine Gultom dkk, 2020), yang mendapat hasil bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif artinya Bantuan ini tidak berhasil untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. hal ini dikarenakan ketidaktepat sasaran para penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai, serta banyaknya masyarakat yang

tergolong miskin malah tidak mendapat bantuan ini, dan sebaliknya masyarakat yang tergolong mampu dalam ekonominya malah mendapatkan bantuan dari program ini, sehingga bantuan program PKH dan BPNT ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Lebih lanjut (Fauziah dkk, 2020) menyatakan bahwa kebijakan program keluarga harapan ini adalah upaya guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan menurut (Mellani, 2022) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mengurangi beban keluarga miskin yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dalam jangka pendek juga bantuan ini disalurkan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi untuk jangka panjang. Dalam jangka panjangnya dimaksudkan disini yaitu untuk membantu generasi yang akan datang atau generasi berikutnya mampu keluar dari garis kemiskinan, serta meningkatkan kemampuan daya saing masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Penerapan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai yang disalurkan oleh pemerintah guna untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menuntut perlunya melakukan berbagai upaya evaluasi guna untuk menilai apakah program bantuan yang telah disalurkan ini mampu mencapai keberhasilan yang telah diterapkan pemerintah atau malah bantuan ini gagal mencapai tujuan yang telah diterapkan pemerintah (Pratiwi dkk, 2022). Evaluasi adalah suatu proses penilaian yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan dan juga kelebihan dari program yang diterapkan. Dengan

melakukan evaluasi ini, segala kelemahan dapat segera diidentifikasi dan diatasi serta kelebihan dapat lebih ditingkatkan kembali. Tujuannya yaitu agar program yang telah diimplementasikan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan harapan Pemerintah. Menurut (Pradina Simanjuntak & Eko Prasetyo, 2019) Kendala ataupun masalah yang sering dialami dalam pemberian bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yaitu adanya ketidaktepat sasaran penerima bantuan program yang diberikan, komitmen yang kurang dari si penerima bantuan, ditemukan banyak para keluarga penerima manfaat bantuan program ini tidak mempergunakan bantuan yang diberikan sesuai dengan arahan dan ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah atau bantuan yang diterima oleh keluarga tidak dipergunakan untuk peningkatan pada aspek kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan berkelanjutan itu masalah yang dihadapi dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan juga terdapat para pendamping PKH yang memang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki sikap yang baik, dimana pendamping PKH masih meminta bayaran atas partisipasi yang telah diberikan oleh pendamping PKH kepada tiap masyarakat yang menerima bantuan ini (Pratiwi dkk, 2022).

Keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diharapkan dapat menekan dan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan juga membuat perubahan tingkah laku keluarga penerima bantuan untuk menelusuri layanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial, meningkatkan ketahanan pangan sesuai dengan Harapan Pemerintah dan mencapai keberhasilan mensejahterakan kehidupan Masyarakat

sesuai dengan UUD oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melihat apakah program yang diterapkan pemerintah sudah tepat dalam menanggulangi kemiskinan dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Jumlah kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018-2022.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah peneliti sampaikan, maka peneliti mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi yakni:

- 1) Masih banyak masyarakat yang dikatakan mampu tapi menerima bantuan sosial yang diberikan Pemerintah.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan Pemerintah.
- 3) Masyarakat yang masih terus bergantung dan tidak mau lepas dari bantuan yang diberikan pemerintah.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Lingkup penelitian ini hanya perihal bagaimana analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pengentasan Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Tempat penelitian hanya dilaksanakan hanya di sekitaran wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Informasi yang akan disajikan hanya sesuai dengan hasil penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis teliti yaitu :

- 1) Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh Terhadap Kemiskinan?
- 2) Apakah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap Kemiskinan?
- 3) Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh Terhadap Kemiskinan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Untuk mengetahui pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan berbagai manfaat bagi peningkatan dunia pendidikan serta ekonomi. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti :

Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai sumber pengembangan kemampuan dalam bidang ekonomi dan menerapkan ilmu ataupun teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan serta sebagai tugas akhir mahasiswa fakultas ekonomi.

2. Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah untuk memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan untuk upaya pembangunan masyarakat yang sejahtera dan meminimalkan kemiskinan

